

Pancasila: “Alat” Kritik

Oleh: **Anhar Gonggong**

1. Pendahuluan: Catatan untuk tema diskusi

Sebelum melanjutkan pembicaraan untuk diskusi pada seksi ini: Keselarasan Agama dan Pancasila, saya merasa perlu menyampaikan catatan bahwa pembicaraan utama saya pada kesempatan yang sangat penting ini, bukanlah terutama tentang Keselarasan Agama dan Pancasila, melainkan terutama: Pancasila: Alat Kritik. Tentu bukan oleh karena saya beranggapan bahwa “tidak penting”. Tentu saya memahami sikap panitia seminar ini ketika menjadikan Keselarasan Agama dan Pancasila sebagai pembicaraan untuk seksi ini.

Dalam waktu akhir akhir ini terjadi pelbagai peristiwa “yang seakan-akan terjadi, berkembang pemahaman tentang ketidak serasian antara Agama dan Pancasila. Sebutlah demonstrasi ketika menjelang Pilkada Ibukota Jakarta; terlihat “gejala “ “seakan-akan” para pendukung calon –calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta saling berhadapan, dan gejala itu memang sangat meresahkan! Saya kira, kita semua peserta pada seksi ini tentu masih bisa membayang-ingat tentang pelbagai peristiwa berkaitan pelaksanaan Pilkada, Gubernur DKI Jakarta.

Tetapi akan halnya pemahaman saya sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai “pelajar “ sejarah , tentang Keselarasan Agama dan Pancasila, maka saya menyatakan kepada hadirin peserta seminar pada seksi ini, “saya percaya bahwa antara Agama dan Pancasila memang memiliki keselarasan sehingga kita seharusnya tidak meragukannya lagi”. Dalam kaitan ini, keselarasan yang berasal dari kata laras, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terbitan Balai Pustaka, 1993, berarti pula kesesuaian (halaman 566). Dan saya percaya bahwa para hadirin juga percaya, memahami bahwa Agama dan Pancasila adalah mempunyai keselarasan, kesesuaian di tengah-tengah bangsa dan rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika!

2. Memahami Posisi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Secara sengaja saya mengambil sub judul ini untuk menjadi pokok uraian dalam seminar ini. Mengapa? Karena dalam pengelihatannya, masih terdapat sejumlah yang tidak kecil – bahkan mungkin ada di antara mereka adalah orang berpendidikan, atau yang mengaku elit, anggota lembaga negara.

Dalam kaitan ini adalah yang menyangkut dengan proses Pancasila menjadi dasar, Weltanschauung, dasar negara, sejak tanggal 1 Juni 1945, ketika anggota BPUPK, Ir. Soekarno menyampaikan rumusan idenya – sebagaimana yg di minta oleh Ketua sidang Dr. Rajiman Wedyodiningrat – yang sistematis yang dinamakannya dengan Pancasila. Dengan tidak mengabaikan rumusan yang telah disampaikan lebih dahulu oleh tokoh-anggota lainnya, faktanya, rumusan Ir. Soekarno-lah yang menjadi bahan utama untuk diproses sebagai Calon dasar negara – istilah yang digunakan oleh Prof. Drs. Mr. Dr. Notonegoro – di pembicaraan selanjutnya.

Proses selanjutnya terjadi setelah pidato Ir. Soekarno tentang rumusan Pancasila yang diusulkannya, melahirkan dua kelompok yang berbeda pendapat tentang rumusan yang di usulkan oleh Ir. Soekarno itu. Dalam situasi itu Ketua BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat membentuk sebuah panitia – dikenal Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno ,dengan Wakilnya Drs. Muhammad Hatta dengan anggota tujuh orang tokoh lain. Apa tugas utama dari Panitia Sembilan ini? Tugas utama dari Panitia Sembilan ini ialah “untuk merumuskan satu formula yng di sepakati bersama”. Setelah rapat beberapa kali, maka tibalah mereka pada satu rumusan formula yang di sepakati bersama dengan nama: Piagam Jakarta. Salah satu rangkaian kata, kalimat dari rumusan formula kesepakatan itu, ialah “.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”. Tetapi di dalam rumusan itu, nama, kata Pancasila tidak tercantum; yang tercantum hanyalah rumusan lima sila Pancasila yang di sepakati oleh panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno itu. Jadi singkat kata: “Piagam Jakarta adalah hasil rumusan, formula yang di sepakati bersama oleh Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Panitia Sembilan yang terdiri dari dua pihak: Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam, pada tanggal 22 Juni 1945.

Selanjutnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Dan rencananya, besoknya, 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan mengadakan sidang untuk membicarakan perangkat- perangkat Konseptual yang akan digunakan untuk membentuk Negara Republik Indonesia. Tetapi pada sore hari, tanggal 17 agustus 1945, menurut Hatta di dalam bukunya: MEMOIR (2002), beliau ditelpon dan kemudian didatangi oleh Opsir Kaigun (Angkatan Laut) – yang datang sebagai Wakil Protestan dan Katolik – yang menyampaikan keberatan sangat terhadap kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (hal. 458).

Setelah mendengar keterangan Opsir Kaigun itu, Hatta menyatakan:

“Tergambar di mukaku perjuanganku yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia merdeka yang baru saja dibentuk akan pecah kembali, dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik divide et impera, politik memecah dan menguasai.” (hal. 459)

Sebagai salah seorang pejuang untuk menuju dan mencapai-wujudkan Kemerdekaan dan adalah penandatanganan Proklamasi Kemerdekaan yang baru beberapa jam yang lalu (kedatangan Opsir Kaigun pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945), tentu saja Hatta mengalami kenyataan yang sangat pahit jika persoalan gugatan terhadap Piagam Jakarta dari Indonesia Timur itu tidak segera diselesaikan. Karena itu Hatta kemudian menyatakan kepada Opsir Kaigun Jepang itu bahwa “esok hari dalam sidang Panitia Kemerdekaan akan kukemukakan masalah yang sangat penting itu. Aku minta ia menyabarkan sementara pemimpin-pemimpin yang berhati panas itu dan berkepala panas itu supaya mereka jangan terpengaruh oleh propaganda Belanda (*Ibid.*)

Jalan penyelesaian yang dilakukan oleh Hatta ialah melakukan pendekatan kepada pemimpin-pemimpin Islam; dan dalam hal itu menemukan: Toleransi pemimpin-pemimpin Islam. Untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya itu Hatta menggambarkan apa yang dilakukannya pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum dimulai sidang PPKI. Beliau menulis:

“Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu, dan menggantinya dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” (*Ibid.*)

Hatta selanjutnya menyatakan:

“Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa” (Ibid.)

Perlu pula dicatat bahwa dalam latar dari persoalan “gugatan warganegara Kristen Indonesia Timur tentang Piagam Jakarta, sebenarnya, pada mulanya, Ir. Soekarno – yang Ketua Panitia Sembilan – menolak untuk menghilangkan ke-tujuh Kata Piagam Jakarta itu. Tetapi demi keutuhan kehidupan bersama bangsa-negara Indonesia, akhirnya beliau pun sepakat atas gugatan warga Kristen Indonesia Timur.

Dalam periode Kemerdekaan bangsa-negara Indonesia, posisi Pancasila sebagai dasar negara, mengalami pelbagai sikap atau pemahaman. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dijalankannya melalui pelbagai gelombang yang terkadang “hempasannya tidak kecil”. Sebagai dasar negara, Pancasila telah melewati – dilihat dari sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan – 3 gelombang dan satu gelombang, yaitu sekarang – 4 gelombang, yaitu pertama, Demokrasi Liberal, kedua, Demokrasi Terpimpin, ketiga, Demokrasi Pancasila, dan keempat, Demokrasi “Reformasi”. Masing-masing periode “pemerintahan demokratis” itu tetap memberikan pengakuan terhadap posisi Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi pengakuan itu lebih bersifat retorika-simbolis dengan interpretasi yang berbeda-beda. Dalam periode pemerintahan demokrasi liberal, posisi Pancasila menjadi bahan polemik baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu 1955. Perdebatan di dalam Badan Konstituante berkembang tentang posisi Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan Badan yang memang bertugas untuk membuat sebuah Undang-Undang Dasar baru yang definitif. Perdebatan yang berkepanjangan diantara kekuatan Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islami, tak kunjung mendapatkan titik temu. Ujung akhir dari polemik di dalam Badan Konstituante itu ialah dikeluarkannya Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Konstituante pun dibubarkan.

Periode demokrasi Terpimpin pun bermula. Sebuah latar perubahan sistem demokrasi Liberal ke demokrasi Terpimpin tampaknya perlu diberi catatan sejak “awal” perjuangannya, Soekarno memang “sangat anti” demokrasi Liberal, dan itu dinyatakannya secara terdokumentasi tertulis, baik di dalam kumpulan tulisannya, Di bawah Bendera Revolusi maupun ketika

merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dua tulisannya pada *Fikiran Rakyat* pada tahun 1932, yaitu “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”, dan “Sekali Lagi Tentang Sosionasionalisme Dan Sosiodemokrasi” menunjukkan sikap anti demokrasi Liberal-Barat. (Lihat, *Di bawah Bendera Revolusi*, Yayasan Bung Karno, Jakarta, 2005, hal. 169-174 dan hal 185-190). Penolakannya terhadap demokrasi Barat itu diulanginya lagi ketika merumuskan idenya tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyatakan:

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan (garis bawah dari penulis) demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-*economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! (*Lahirnya Pantjasila Bung Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara* (POETRA, Pemuda Penyelamat Rakyat), hal. 39.

Dalam kaitan dengan penolakan Soekarno terhadap demokrasi Barat yang memang telah dilakukannya sejak 1932 itu, maka sebenarnya ketika beliau menduduki jabatan Presidennya dalam periode demokrasi Liberal, 1950-1959, beliau berada di dalam situasi – paling tidak menurut saya – politik-psikologis yang “sangat tidak nyaman”! Tidak jarang beliau menunjukkan hal itu, antara lain, dalam kata-kata: “Partai-partai hanya mencari kursi, mencari kedudukan; hal yang sama juga sebenarnya ada pada sikap Muhammad Hatta, sebagai Wakil Presiden. Demikian tidak senangnya dengan situasi sistem pemerintahan waktu itu, bahkan Presiden Soekarno “pernah – dalam pidato Ulang Tahun PGRI, 1956, kalau tidak salah ingat – menganjurkan untuk membubarkan partai-partai. Partai-partai dituduhnya “kerjanya dagang sapi”. Tetapi kemudian beliau, karena usulnya membubarkan partai itu, tampaknya menghadapi penolakan dari pemimpin-pemimpin partai, maka beliau mengeluarkan “reaksi-keluhan” dalam kata-kata: Kepala terbantur pada tembok besar”.

Dalam periode waktu 1957-1958, Presiden Soekarno tampaknya sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengganti sistem demokrasi Liberal yang sejak kemerdekaan telah digunakan untuk menjadi landasan sistem pemerintahan negara. Presiden Soekarno, dengan didukung oleh pimpinan TNI KSAD, Jenderal Mayor A.H. Nasution dan Kabiner Djuanda, akhirnya beliau berhasil. Sejak tanggal 17 Agustus 1959 melalui pidato politik kenegaraan memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan bangsa-negara

Indonesia, yang diberinya judul: *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, maka landasan ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang baru, dengan nama: Demokrasi Terpimpin dimulai. Sepanjang pemerintahan Presiden Soekarno – yang bersifat Kabinet Presidensial berdasar UUD 1945 – yang berlangsung ±6 tahun itu – mempunyai ciri-ciri utama, yaitu pertama, (anggapan) revolusi belum selesai dan kedua, diciptakan ideologi baru, Nasionalisme, Agama, dan Komunis (selanjutnya NASAKOM), dan ketiga Manifesto Politik (Manipol), yaitu rumusan rincian dari pidato politik kenegaraan 17 Agustus 1959 yang pada akhirnya menjadi acuan di dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan atau pembangunan; juga ada rumusan dari Presiden Soekarno, yaitu Sosialisme Indonesia dan lain-lain. Karena adanya anggapan bahwa walaupun kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 dan telah diakui kedaulatannya sejak 27 Desember 1949 (hasil Konpres Medja Bundar = KMB di Den Haag), tetapi revolusi (Kemerdekaan) belum selesai. Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin yang juga bersifat, berfikir revolusioner; dan pemimpin yang demikian itu tidak lain ialah Presiden Soekarno sendiri; karena itu beliau diberi gelar kedudukan: Pemimpin Besar Revolusi (PBR).

Dari segi posisi Pancasila – paling tidak dalam penglihatan saya – sebagai dasar-ideologi negara, mengalami “pengasingan” karena tampak mendapatkan ruang lebih luas pada pelbagai kesempatan ialah ideologi “Kontemporer” rumusan pada awal demokrasi Terpimpin, seperti Manipol, Nasakom dan atau Sosialisme Indonesia. Selama periode pemerintahan demokrasi Terpimpin konflik internal di antara pendukung utama Presiden Soekarno, terutama antara TNI-Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.H. Nasution; yang kemudian digantikan oleh Letjen. Ahmad Yani. Pertentangan terbuka atau tertutup di antara para pendukung pemerintahan demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, tak dapat dibendung. Akhirnya peristiwa pemberontakan G30S/PKI 1965 membuka kenyataan disekitar Presiden Soekarno, yang sebenarnya dilingkari oleh pemimpin-pemimpin ideologi yang saling “berkelahi”.

Dengan terjadinya G30S/PKI melalui Dewan Revolusi Pimpinan Letkol Untung yang berhasil secara cepat “ditumpas” oleh pasukan TNI – RPKAD (= kini Kopassus) pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Singkatnya setelah melalui proses “negosiasi” politik dalam periode 1965-1967, maka pada akhirnya Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai pejabat (Pj) Presiden melalui sidang istimewa MPRS, untuk selanjutnya pada tahun 1968, Pj. Presiden Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden definitif. Sejak

itu kekuatan politik Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto merumuskan-kembangkan rencana-rencana jalannya pemerintahan Orde Baru yang bersemboyan: Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara Murni dan Konsekwen.

Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto merencana-jalankan beberapa kebijakan-strategis, antara lain rencana pembangunan yang dikenal (Rencana) Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Setelah melalui langkah-langkah strategis, termasuk memperoleh pinjaman dari negara-negara tertentu dan/atau lembaga keuangan tertentu, maka Repelita I pun dijalankan pada tahun 1969-1974. Demikianlah seterusnya, Presiden Soeharto – Orde Baru melangkah melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam “semua” bidang, termasuk dalam bidang politik, penyederhanaan partai menjadi dua partai: Partai Persatuan Pembangunan: PPP, leburan dari partai-partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia: PDI, leburan dari partai-partai Nasionalis – Agama-agama Non Islam.

Ciri utama dari pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto ialah pertama, pelaksanaan pembangunan – dengan tekanan pada bidang ekonomi dan dilaksanakan dalam bentuk Repelita, 1969-1997. Untuk menopang rencana pembangunan itu, maka dirumuskanlah Dwifungsi ABRI yang membuka ruang-ruang pemerintahan bagi anggota ABRI, pada semua lini pemerintahan negara. Dalam kaitannya dengan posisi Pancasila sebagai dasar-ideologi negara, karena justru semboyan menjalankan Pancasila secara Murni dan Konsekwen. Untuk mewujudkan semboyan itu, salah satu yang dilakukannya ialah membentuk lembaga pendidikan-sosialisasi Pancasila dalam bentuk BP7 yang melaksanakan penataran Pancasila, yang dahulu dikenal dengan “penataran P4”. Penataran P4 diberikan kepada pelbagai pihak dari pegawai negeri dari departemen-departemen pemerintahan ABRI, mahasiswa dan pelajar bahkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Apa yang dituturkan di dalam kegiatan P4 itu termasuk apa yang dimaksudkan dengan demokrasi Pancasila; demokrasi Pancasila sejak 1967. Dalam kaitan itu apa yang dimaksudkannya dengan demokrasi Pancasila, hal ini diketahui di dalam pidato Pejabat Presiden Jenderal Soeharto ketika menyampaikan pidato di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum perayaan Proklamasi Kemerdekaan bangsa-negara Indonesia. Tentang hal ini Pejabat Presiden Soeharto menyatakan:

“Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru. Setiap insan Indonesia, setiap organisasi, setiap bentuk usaha apapun yang menamakan dirinya Orde Baru harus menerima dua landasan pokok Pancasila dan UUD 1945; tidak saja menerima tetapi harus mengamalkan dan isi kepada Pancasila dan UUD 1945 sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, semurni-murninya sesuai dengan jiwa dan semangatnya.

Digunakannya menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara Murni dan Konsekwen, karena Orde Baru dan Jenderal Soeharto beranggapan bahwa Orde Lama selama ini, telah menyelewengkan (makna) Pancasila dan UUD 1945. Tentang demokrasi yang dijalankan oleh Orde Baru, sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal Soeharto pada kesempatan itu ialah demokrasi Pancasila. Tentang hal ini, Jenderal Soeharto menyatakan:

“Demokrasi yang kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila, yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.” (Soeharto: Demokrasi

Pancasila, di dalam, David Bourehier dan Vedi R. Hadiz, editor, *Grafiti Z Freedom Institute*, Jakarta, 2006, hal. 51). Dalam pendapat Jenderal Soeharto, kehidupan demokrasi Pancasila tidak mengenal golongan Oposisi seperti yang dikenal oleh sistem demokrasi Liberal; demokrasi Pancasila hanya mengenal musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan-perwakilan baik di DPR maupun MPR. Dalam hal ini menurut Jenderal Soeharto, “perlu kita sadari benar-benar, bahwa sistem ketatanegaraan menurut konstitusi UUD 1945, menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ada dalam tangan Presiden, yang mempertanggungjawabkannya kepada MPR, sedangkan para menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden yang bertanggungjawab kepada Presiden....” (*Ibid.*)

Jenderal Soeharto telah berkuasa selama ±30 tahun dengan mensosialisasikan Pancasila melalui BP7-P4 sejak 1978. Tetapi Presiden Soeharto sendiri

tampaknya berusaha memahami Pancasila melalui konsep teoritisnya sendiri. Hal ini pernah disampaikannya di rumahnya, di depan organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Golkar. Beliau berpendapat bahwa Pancasila, Warisan Nenek Moyang (Ibid., 138). Dikatakannya bahwa

“Kemudian saya memberanikan diri untuk mencoba mencari teori atau ilmu yang dipakai oleh nenek moyang kita dalam melahirkan Pancasila. Pencarian itu membuktikan bahwa teori dan ilmu yang dipakai oleh nenek moyang kita sangat sederhana, sehingga karena kesederhanaannya itu sukar dimengerti oleh para sarjana. Begitu sederhanya teori itu sehingga tidak mudah mencari perbandingannya dengan teori yang lebih modern, seperti ideologi Marxis, Komunis, dan sebagainya (Ibid., hal. 141).

Setelah memberikan keterangan tentang hebatnya nenek moyang kita dengan teorinya yang sederhana itu, Soeharto selanjutnya berkata:

“Hebat betul. Mereka telah mempunyai prinsip-prinsip yang mereka kembangkan dan mempengaruhi kehidupan rakyat. Prinsip-prinsip ini akhirnya membudaya dan kita rumuskan sebagai gotong royong, bantu membantu satu sama lain. Ini sebetulnya juga didasarkan kepada teori di ilmu – teori dan ilmunya sangat sederhana. Ilmu pertama dari nenek moyang kita, yang oleh kaum modern dinilai sebagai ilmu klenik atau mustik, adalah ilmu kasunyatan.

Pertama, kasunyatan itu kenyataan faktual. Mereka yang orang Jawa tentu mengetahuinya, tetapi yang dari luar Jawa supaya mempelajarinya. Ilmu Kasunyatan, ilmu tentang fakta, kemudian dikembangkan menjadi ilmu sangkan paraning dumadi, yaitu ilmu tentang dari mana dan kemana hidup manusia. Sangkan paraning dumadi kemudian dikembangkan menjadi ilmu kesempurnaning hurip, dus hidup yang sempurna” (Ibid., hal. 141-142).

Tentu sebagian dari kita yang ada di sini, pernah mengalami pelbagai hal yang dikemukakan di atas, di dalam periode perjalanan Pancasila dalam posisinya sebagai dasar negara dengan pemahaman yang berbeda-beda. Dan ketika kita berada di dalam periode sekarang, yang kita telah jalani selama 15 tahun, demokrasi Reformasi, Pancasila berada pada situasi yang “terabaikan”, walau tetap dihebat-hebatkan dalam retorika.

3. Membangun Pemahaman Baru: Pancasila Sebagai Alat Kritik

Sejak kita merdeka, terutama di dalam periode kesejarahan yang saya gambarkan di atas, posisi Pancasila terutama ditekankan pada dua aspek utama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai alat pemersatu. Penekanan terhadap kedua hal itu tentu saja seharusnya memang begitu. Ir. Soekarno sendiri sebagai perumus awal dari Pancasila pada 1 Juni 1945, memang bertujuan utama persatuan, sesuai dengan realitas yang dihadapi untuk menjadi bangsa-negara merdeka. Sebagai dasar negara dan sebagai alat pemersatu memang telah mengalami pelbagai usaha untuk digunakan oleh pemerintah-pemerintah yang dibangun sejak periode 1945 - sampai sekarang. Terlepas dari adanya kritik terhadap interpretasi Pancasila sebagai dasar negara dan alat persatuan, harus diakui, kita berhasil bertahan hidup bersama di dalam bangsa-negara Indonesia, sampai sekarang ini, adalah karena pemahaman kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai alat pemersatu.

Tetapi sebagai bangsa-negara merdeka tentu kita telah berhadapan dengan pelbagai kenyataan, baik kenyataan internal kita sendiri, dan terutama juga dengan penghadapan kita dengan perkembangan arus dari luar, sebutlah apa yang sering menjadi pembicaraan masyarakat mondial, tentang globalisasi. Persoalannya ialah apa jawaban dan tindakan kita menghadapi persoalan-persoalan “rumit” yang dilahirkan oleh kedua hal di atas, persoalan perubahan internal kita dan perubahan yang terjadi karena globalisasi.

Hal inilah sebenarnya yang hendak saya bawakan di depan peserta seminar dalam seksi ini. Yang saya maksudkan ialah saya beranggapan bahwa selama ini kita memahami Pancasila hanya sebagai dasar negara dan alat pemersatu, walau saya tegaskan di atas, hal itu memang seharusnya. Tetapi di dalam menghadapi arus perubahan baik internal maupun eksternal, kita melupakan salah satu fungsi utama dari Pancasila ialah sebagai **alat kritik**. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, 1993, kata Kritik diartikan sebagai kecaman atau tanggapan; selanjutnya dikatakan “kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat” (KBBI, hal. 531).

Sebagai bangsa-negara merdeka, kita telah berhadapan dengan pelbagai persoalan internal kita; juga sekaligus dengan tantangan arus global yang tidak dapat hanya mengikuti arus yang jika kita tidak hati-hati menghadapinya, atau kalau kita tidak memiliki alat konseptual untuk menghadapinya, maka kita akan dihempaskannya dengan sangat keras.

Kita telah melaksanakan pembangunan dalam pelbagai aspek kehidupan, tetapi persoalannya tidaklah terletak dengan hanya pelaksanaan pembangunan itu, melainkan terutama terletak pada apakah caranya dan hasilnya adalah sesuai dengan tujuan kemerdekaan kita untuk mendirikan negara yang berdasar Pancasila. Ketika kita melihat berita yang menunjukkan seorang wanita renta-miskin, di Jember, karena tidak ada tetangganya yang memberikan makanan, maka untuk mengurangi rasa laparnya, nenek renta itu makan rumput, setelah ditumbuk-tumbuk.

Yang berkaitan dengan arus global, dengan sistem kapitalis-liberal yang mengatur “kehidupan masyarakat dunia”, dan kita juga tidak dapat menghindarinya, persoalan yang kita hadapi ialah apakah bangsa-negara kita, dengan Pancasila, hanya akan mengikuti arus, untuk kemudian terhempas. Tidakkah Pancasila dapat menjadi alat kritik terhadap kenyataan itu?

4. Penutup: Menatap Hari Depan Indonesia Ber Pancasila

Apa yang saya kemukakan secara singkat – bahkan amat singkat, tetapi saya berharap hal ini di hari-hari yang tidak lama akan saya rumuskan secara lebih jelas-panjang – namun saya berharap dari Anda peserta, saya akan mendapat banyak tanggapan yang tentu akan berguna untuk kita semua. Saya sangat mengharapkan tanggapan Anda, bahkan dalam bentuk kecaman sekalipun.

Saya terpanggil untuk mencari alternatif ini, karena saya menatap Hari Depan Indonesia yang Ber Pancasila!